
Tipologi Sektor Perikanan dan Disparitas Pendapatan di Kabupaten Cirebon

(Typology of Fisheries Sector and Income Disparities at Cirebon Regency)

^{1*)} Achmad Rizal, ¹⁾ Iwang Gumilar, ¹⁾ Lupita Lestari

¹⁾ Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran,
Jl. Bandung – Sumedang Km 21 Jatinangor, Sumedang,
Jawa Barat, Indonesia.

*⁾ Korespondensi : arizrzl@gmail.com

Diterima : 10 Oktober 2017 / Disetujui : 12 Desember 2017

ABSTRAK

Pembangunan adalah tindakan-tindakan yang diarahkan untuk memperoleh kualitas hidup yang lebih baik. Kebijakan pembangunan selama ini dimaksudkan agar terdapat pemerataan dalam menikmati pembangunan, namun disparitas antar wilayah masih sering dirasakan. Disparitas yang terjadi sebenarnya diakibatkan oleh perbedaan potensi Sumberdaya Alam (SDA) dan kondisi demografi yang dalam proses pembangunannya berujung pada tidak meratanya distribusi pendapatan per kapita. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besar disparitas pendapatan wilayah pesisir dan non pesisir di Kabupaten Cirebon dan menganalisis posisi sektor perikanan sebagai basis ekonomi di Kabupaten Cirebon pada tahun 2011-2015. Penelitian ini dilakukan dengan metode survey, teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dengan melakukan pencatatan langsung pada lembar data *time series* dari tahun 2011-2015 dan pengisian kuisisioner oleh masyarakat pesisir dan non pesisir, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas pendapatan di wilayah non pesisir lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah pesisir dengan rata-rata nilai Indeks Williamson sebesar 0,20 untuk wilayah pesisir dan 0,29 untuk wilayah non pesisir, sedangkan melalui analisis basis ekonomi didapatkan hasil bahwa subsektor perikanan di Kabupaten Cirebon adalah sektor basis ekonomi dengan beberapa komoditas unggulan hasil tangkapan seperti udang windu, kerang darah, gurita dan rajungan.

Kata kunci : disparitas, pendapatan, basis ekonomi, pesisir.

ABSTRACT

Development is directed actions to obtain a better quality of life. Development policy is intended to provide equity in the part of development, but the disparities between regions are still occur. The actual disparities are caused by potential distinct of Natural Resources (SDA) and demographic conditions which in the development process lead to uneven distribution of income per capita. This study aims to analyze the major disparities of coastal and non-coastal income in Cirebon Regency and analyze the position of the fishery sector as the economic base in Cirebon Regency in year 2011-2015. This research was conducted by survey method, the sampling technique by purposive sampling method. Data collection technique by recording directly on time series data sheets from 2011-2015 and filling questionnaires by coastal and non-coastal communities, the Department

of Marine and Fisheries, Planning Agency Regional Development, as well as the Central Bureau of Statistics of Cirebon Regency. The results showed that income disparities in non-coastal areas were higher than coastal areas with an average value of the Williamson Index of 0.20 for coastal areas and 0.29 for non-coastal areas, while through economic base analysis showed that fishery sub-sector in Kabupaten Cirebon is the economic base sector with some superior commodities such as tiger shrimp, shellfish, octopus and crab.

Keywords : *disparities, income, economic base, coastal region.*

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah tindakan-tindakan yang diarahkan untuk memperoleh kualitas hidup yang lebih baik. Upaya untuk memperoleh kualitas dan kesejahteraan hidup merupakan hak seluruh masyarakat. Terlebih di negara-negara berkembang, pembangunan merupakan pilihan penting guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan sebenarnya dilaksanakan untuk mengolah sumberdaya yang ada dan meningkatkan perekonomian, namun seiring dengan meningkatnya perekonomian semakin tinggi pula kesenjangan/disparitas antar daerah (Rérat, 2012). Kondisi geografis dan sumber daya yang berbeda-beda pada masing-masing wilayah telah menyebabkan potensi yang berbeda pula sehingga terdapat wilayah yang lebih makmur daripada wilayah lainnya (Williamson, 1965).

Disparitas pembangunan antar wilayah adalah aspek yang umum dalam kegiatan ekonomi suatu daerah yang pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Pertumbuhan tidak selalu terjadi secara merata pada semua wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu, tidaklah mengherankan bilamana pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju dan wilayah terbelakang. Terjadi ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah (Williamson, 1965). Hal inilah yang pada akhirnya mengakibatkan adanya disparitas pendapatan masyarakat pada wilayah yang berbeda.

Potensi perikanan tangkap Kabupaten Cirebon, berdasarkan data statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon (2015) terdiri atas ikan pelagis besar (5.627 ton/tahun), ikan pelagis kecil (11.425 ton/tahun), ikan demersal (4.261 ton/tahun), kerang (331 ton/tahun). Potensi tersebut memungkinkan jika subsektor perikanan tangkap dapat berperan sebagai basis ekonomi dalam peningkatan pendapatan daerah. Dengan demikian, jika subsektor perikanan dikelola secara optimal akan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan ekonomi wilayah terutama wilayah pesisir sehingga disparitas pendapatan wilayah pesisir dapat diminimalisasi.

Pembangunan wilayah yang selama ini cenderung bias darat mengakibatkan kurang diperhatikannya aspek pembangunan pesisir. Padahal perikanan sebagai sebuah sistem memiliki peran penting dalam penyediaan pangan, kesempatan kerja, perdagangan dan kesejahteraan serta rekreasi bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi masyarakat pesisir. Pola pembangunan wilayah pesisir selama ini masih disamakan dengan pola pembangunan wilayah terestrial

lainnya dengan kondisi yang dianalogikan dengan wilayah pertanian di pedesaan. Ada beberapa kesalahan yang terjadi karena wilayah pesisir sesungguhnya memiliki beberapa karakteristik yang khas.

Perbedaan yang mendasar secara ekologis sangat berpengaruh pada aktivitas masyarakatnya. Kerentanan perubahan secara ekologis berpengaruh secara nyata terhadap usaha perekonomian yang ada di wilayah tersebut. Hal ini disebabkan karena ketergantungan yang tinggi dan aktivitas ekonomi masyarakat pada sumberdaya. Jika sifat kerentanan wilayah ini tidak diperhatikan maka akan muncul konflik antar kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan pembangunan ekonomi jangka pendek dengan kebutuhan generasi mendatang terhadap sumberdaya pesisir (Rizal, 2013a).

Kuznets (1995) dalam Rizal (2013b) menyatakan hipotesis adanya kurva U terbalik yang menggambarkan ketika awal pembangunan dimulai akan terjadi ketimpangan distribusi pendapatan, tetapi setelah pembangunan mencapai suatu titik tertentu, ketimpangan distribusi pendapatan akan makin berkurang. Kurva ini menyatakan bahwa ketimpangan cenderung bertambah lebar pada tahap-tahap awal pertumbuhan ekonomi namun kemudian akan makin mengecil pada tahap-tahap yang lebih lanjut, kemudian pada suatu saat akan terjadi pelebaran ketimpangan lagi namun akhirnya menyusut kembali.

Pada bidang perikanan tangkap pada tahap awal pertumbuhan akan menaikkan pendapatan nelayan yang memiliki modal dan teknologi sedangkan pendapatan nelayan yang mengalami keterbatasan modal dan teknologi akan menurun. Pendapatan yang lebih tinggi akan tercermin dalam permintaan yang lebih besar akan barang jadi dan input perikanan tangkap seperti alat tangkap, maka pembelian dari kota-kota sekitar akan meningkat. Pembangunan tahap lanjut akan memberikan fasilitas kepada nelayan kecil agar dapat bersaing dengan nelayan yang memiliki modal besar.

Era baru sektor perikanan (khususnya perikanan tangkap) dalam rangka pembangunan ditujukan pada kelestarian perikanan dan ekonomi yang harus mendukung perkembangan daerah (DKP Kabupaten Cirebon 2015). Dalam rangka mencapai pembangunan dan pengembangan perikanan tangkap, maka pengarah kebijakan pembangunan wilayah pesisir secara terpadu amat diperlukan. Pengarah kebijakan tersebut terdiri dari empat aspek utama, yaitu: *pertama*, aspek teknis dan teknologi; *kedua*, aspek sosial, ekonomi dan budaya; *ketiga*, aspek sosial politik; dan *keempat*, aspek hukum dan kelembagaan. Empat aspek ini menjadi fokus penting, karena pendekatan pembangunan wilayah pesisir secara terpadu pada hakikatnya merupakan bagian dari pendekatan administrasi pembangunan. Friedman (1987) mengungkapkan bahwa pendekatan administrasi pembangunan pada perencanaan kebijakan yang terkait sumberdaya alam urgen mengaitkannya pada aspek-aspek pranata-pranata sosial, ekonomi, politik, dan hukum serta kelembagaan agar pembangunan dapat berhasil.

Berdasarkan teori basis ekonomi mengungkapkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut (Rérat, 2012). Oleh karenanya, perencanaan kebijakan bagi kegiatan ekonomi daerah sebaiknya dikelompokkan atas kegiatan basis dan kegiatan non basis. Hanya kegiatan basis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah (Rérat dan Lees, 2011). Secara teori, kegiatan ekonomi disebut basis jika kegiatan ekonomi tidak terikat pada kondisi internal perekonomian wilayah dan

sekaligus sebagai pendorong tumbuhnya sektor perekonomian lain. Kegiatan basis memiliki peran sebagai penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Semakin besar ekspor suatu wilayah ke wilayah lainnya akan semakin maju pertumbuhan wilayah tersebut begitu juga sebaliknya (Rérat, 2012). Sebaliknya kegiatan ekonomi disebut Non basis jika kegiatan ekonomi tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayahnya sendiri namun pertumbuhannya tidak menjadi pendorong tetapi tergantung pada kondisi umum perekonomian di wilayah tersebut.

Sektor basis daerah bukan merupakan faktor mutlak yang dapat menyelesaikan masalah disparitas pembangunan wilayah, determinan pertumbuhan ekonomi wilayah dalam mengurangi ketimpangan pembangunan dapat dilakukan melalui investasi pada *natural capital*, *physical capital*, *human capital* dan *social capital* (Iyer *et al.*, 2005). Hanya saja, salah satu upaya dalam mengurangi ketimpangan (disparitas) pembangunan wilayah dapat dilakukan melalui investasi pembangunan di sektor-sektor basis. Hal ini seperti telah dikemukakan oleh Miranti *et al.* (2013) bahwa pemetaan sektor-sektor ekonomi potensial (basis) di tiap wilayah sangat penting untuk mengatasi masalah disparitas pembangunan wilayah.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis besar disparitas pendapatan wilayah pesisir dan non pesisir di Kabupaten Cirebon pada tahun 2011-2015 dan (2) Menganalisis posisi subsektor perikanan sebagai basis ekonomi di Kabupaten Cirebon pada tahun 2011-2015.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai April 2017. Data yang diperoleh untuk penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari Biro Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, Badan Pengurus Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, Dinas Perikanan Kabupaten Cirebon, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dan instansi-instansi terkait lainnya. Sedangkan data primer didapat dari hasil pengisian kuesioner. Teknik pemilihan responden menggunakan *purposive sampling* (pengambilan sampel berdasarkan tujuan penelitian). Jumlah responden 100 orang berdasarkan pembagian prosentase kecamatan pesisir dan kecamatan non pesisir. Responden diberikan kuesioner tertutup (*closed quetionnaire*). Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey yang dilaksanakan di wilayah pesisir dan non pesisir Kabupaten Cirebon.

Alat analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat disparitas pendapatan adalah Indeks Williamson (Williamson, 1965) dan *Gini Ratio* (Ravallion dan Chen, 2001) dengan rumus sebagai berikut :

1) Indeks Williamson

$$a. V_w = \sqrt{\frac{\sum (y_i - y)^2 \frac{f_i}{n}}{y}}$$

$$b. V_{uw} = \sqrt{\frac{\sum (y_i - y)^2}{\frac{f_i}{y}}}$$

Keterangan :

- Vw = *Weighted Variation*
 Vuw = *Unweighted Variation*
 yi = PDRB per kapita di kecamatan i
 y = PDRB per kapita kabupaten
 fi = Jumlah penduduk di kecamatan i
 n = Jumlah penduduk kabupaten

2) *Gini Ratio*

$$GR = 1 - \sum_{f=1}^n fpi \times (Fci + Fci - 1)$$

Keterangan :

- GR = *Gini Ratio* / Rasio Gini
 fpi = Frekuensi penduduk dalam kelas pendapatan ke-i
 Fci = Frekuensi kumulatif dari total pendapatan dalam kelas pendapatan ke-i
 Fci-1 = Frekuensi kumulatif dari total pendapatan dalam kelas pendapatan ke (i-1)

Selain menganalisis seberapa besar disparitas pendapatan, penelitian ini juga menganalisis posisi sektor perikanan sudah termasuk sektor ekonomi basis dengan komoditas-komoditas perikanan tangkap yang menjadi komoditas unggulan dengan menggunakan LQ (*Location Quotient*) sebagai alat analisis, dengan rumus sebagai berikut (Mudrajad (2002) dalam Rizal, 2013b) :

$$LQ = \frac{Si/S}{Ni/N} \text{ atau } \frac{Si/Ni}{S/N}$$

Keterangan :

- LQ = Besarnya *Location Quotient*
 Si = Nilai tambah sektor di tingkat kecamatan i
 S = PDRB di kecamatan i
 Ni = Nilai tambah sektor di tingkat kabupaten
 N = PDRB di tingkat kabupaten

$$LQ = \frac{qi}{qt} \Big/ \frac{Qi}{Qt} \text{ (Hood, 1998)}$$

Keterangan :

- LQ = *Location Quotient*
 Qi = Produksi ikan jenis ke-I Provinsi Jawa Barat
 Qt = Total produksi perikanan tangkap Provinsi Jawa Barat
 qi = Produksi jenis ke-I Kabupaten Cirebon
 qt = Total produksi perikanan tangkap Kabupaten Cirebon

Klasifikasi Nilai LQ terdiri atas 2 Klasifikasi, yaitu jika nilai LQ > 1, berarti sektor /komoditas adalah kategori basis dan jika nilai LQ < 1, sektor/komoditas adalah kategori non basis (Hood, 1998; Sodik dan Nuryadin, 2005; Rustiadi *et al.*, 2009; Miranti *et al.*, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Letak Geografis dan Luas Wilayah

Kabupaten Cirebon yang memiliki luas daerah sebesar 990,36 km² adalah bagian dari wilayah Propinsi Jawa yang terletak di bagian timur dan merupakan batas, sekaligus sebagai pintu gerbang Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan letak geografisnya wilayah Kabupaten Cirebon berada pada posisi 108°40' – 108°48' Bujur Timur dan 6°30' – 7°00' Lintang Selatan yang dibatasi oleh :

- Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Indramayu dan Laut Jawa
- Sebelah barat laut berbatasan dengan wilayah Kabupaten Majalengka
- Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kuningan
- Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kota Cirebon dan Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah

Kondisi Demografi

Kondisi demografi Kabupaten Cirebon dari tahun ketahun diwarnai oleh peningkatan penduduk. Penduduk didefinisikan sebagai sekelompok orang yang menempati suatu wilayah. Jumlah penduduk Kabupaten Cirebon pada tahun 2015 adalah 2.112.670 Jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,66% dari tahun 2014 ketika jumlah penduduk adalah 2.098.800 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Cirebon dari tahun ke tahun sejak 2011-2015 selalu meningkat dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,47% pada tahun 2011, 0,53% pada tahun 2012, 0,75% pada tahun 2013 dan 0,78% pada tahun 2014 dengan pertumbuhan penduduk tertinggi pada 2015 sebesar 0,87%. Kecamatan yang memiliki jumlah rata-rata penduduk paling besar selama 2011-2015 adalah Kecamatan Sumber dengan rata-rata jumlah penduduk sebesar 82.286 jiwa, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah rata-rata penduduk paling kecil adalah Kecamatan Pasaleman sebesar 25.055 jiwa.

Jika jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon dibagi dua yaitu secara wilayah non pesisir dan pesisir maka akan didapat hasil 32 kecamatan wilayah non pesisir dan 8 kecamatan wilayah pesisir. Jumlah penduduk rata-rata wilayah pesisir dari 8 kecamatan adalah 478.764 jiwa. Kecamatan di wilayah pesisir yang memiliki jumlah rata-rata penduduk paling besar adalah Kecamatan Gunungjati dengan rata-rata jumlah penduduk sebesar 78.519 jiwa, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah rata-rata penduduk paling kecil adalah Kecamatan Suranenggala sebesar 41.503 jiwa.

Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi Kabupaten Cirebon dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Suatu wilayah dapat diketahui seberapa baik pertumbuhan ekonominya dengan melihat nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhan lapangan usaha. Laju pertumbuhan lapangan usaha identik dengan laju pertumbuhan sektoral dan subsektornya dalam data statistik PDRB. Kabupaten Cirebon dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik bila kondisi perekonomiannya meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya perekonomian suatu wilayah dapat terjadi manakala wilayah tersebut menjalankan pembangunan, efek dari pertumbuhan wilayah ini tercermin dengan semakin tingginya nilai PDRB.

PDRB merupakan cerminan dari laju pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karenanya PDRB merupakan salah satu indikator yang amat penting, dalam menilai kinerja suatu perekonomian dan tingkat kesejahteraan penduduk. Secara teori pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja memiliki hubungan yang positif, yaitu apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka kesempatan kerja yang tercipta juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi selalu dipakai sebagai ukuran terciptanya lapangan kerja baru untuk mengurangi tingkat pengangguran (Samuelson dan Nordhous, 1992).

Nilai PDRB Kabupaten Cirebon dalam kurun waktu 2011-2015 terus meningkat hanya saja dengan laju pertumbuhan yang semakin menurun. Kondisi fluktuasi berimplikasi pada kondisi ekonomi dan penyerapan tenaga kerja daerah. Laju pertumbuhan paling besar terjadi pada pada tahun 2011 sebesar 5,08% dan setelah itu terus menurun hingga tahun 2015 hanya mengalami sedikit peningkatan dari tahun 2012 dengan laju pertumbuhan sebesar 4,81% menjadi sebesar 4,83%.

Nilai kontribusi subsektor perikanan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi selama periode 2011-2015 seperti yang disajikan pada Tabel 1. Kondisi fluktuasi di subsektor perikanan berimplikasi pada kondisi ekonomi dan penyerapan tenaga kerja subsektor perikanan Kabupaten Cirebon. Nilai fluktuatif tersebut sebesar 6,85% pada tahun 2011, laju 6,76% pada tahun 2012, laju 3,67% pada tahun 2013, laju 2,12% pada tahun 2014 dan laju 9,77% pada tahun 2015. Laju peningkatan yang paling besar terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 9,77%.

Tabel 1. PDRB sub sektor perikanan periode 2011-2015 atas dasar harga konstan Tahun 2000.

Tahun	Perikanan (Juta Rupiah)	Laju Pertumbuhan (%)
2011	365,778.39	6.85
2012	390,511.00	6.76
2013	404,861.76	3.67
2014	413,444.56	2.12
2015	453,821.05	9.77

Sumber : PDRB Kabupaten Cirebon 2015

Disparitas Pendapatan Antar Wilayah

Besarnya ketimpangan PDRB perkapita antara wilayah pesisir dan non pesisir memberikan gambaran tentang perkembangan pembangunan ekonomi di Kabupaten Cirebon. Tabel 2 berikut adalah hasil penghitungan indeks williamson untuk mengetahui seberapa besar ketimpangan pendapatan pada wilayah pesisir dan non pesisir.

Tabel 2 menunjukkan angka ketimpangan rata-rata PDRB per kapita pada wilayah pesisir selama periode 2011-2015 menggunakan indikator Vw adalah 0,20 jika menggunakan indikator Vuw sebesar 0,0039. Pada wilayah non pesisir selama periode 2011-2015 jika digunakan indikator Vw nilainya sebesar 0,29, sementara jika menggunakan indikator Vuw sebesar 0,0079. Indeks Vw digunakan untuk menganalisis distribusi pendapatan per kapita yang diukur melalui jumlah penduduk kabupaten. Nilai Vw yang tinggi memperlihatkan terjadinya disparitas atau ketidakmerataan pendapatan secara regional atau

kabupaten. Sementara itu nilai *Vuw* menunjukkan disparitas pendapatan masyarakat pada tingkat wilayah yang lebih rendah, dalam hal ini kecamatan.

Tujuan pembangunan ekonomi daerah (bersifat multidimensional) adalah menciptakan pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan (disparitas), dan pengangguran (Todaro, 2006). Salah satu masalah dalam perekonomian daerah Kabupaten Cirebon yaitu adanya disparitas spasial.

Tabel 2. Hasil penghitungan indeks Williamson pada wilayah pesisir dan non pesisir di Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2015

Indeks	Wilayah	2011	2012	2013	2014	2015	Rerata
Vw	Pesisir	0,17	0,19	0,20	0,22	0,21	0,20
	Non Pesisir	0,28	0,28	0,29	0,292	0,29	0,29
Vuw	Pesisir	0,00	0,0039	0,0039	0,0042	0,0043	0,0039
	Non Pesisir	0,0078	0,0078	0,0078	0,0079	0,0080	0,0079

Disparitas adalah salah satu hasil pembangunan daerah yang diukur dari besaran pendapatan perkapita. Disparitas spasial terjadi karena adanya perbedaan SDA dalam mekanisme pembangunan yang akhirnya menghasilkan ketimpangan pendapatan perkapita antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya. Penyebabnya menurut pandangan Williamson (1965) pertumbuhan tidak selalu terjadi secara merata pada semua wilayah.

Hasil perhitungan angka indeks Williamson yang lebih besar menunjukkan bukti ketidakmerataan pendapatan di kecamatan-kecamatan pesisir yang lebih besar dibanding yang non pesisir. Di kecamatan-kecamatan pesisir Kabupaten Cirebon sebagian besar penduduknya memiliki pendapatan yang berasal dari hasil usaha penjualan hasil perikanan. Hasil ini menunjukkan usaha perikanan masih belum dapat mengangkat masyarakat pesisir dari ketidakmerataan pendapatan. Hal ini secara ekonomi mencerminkan tingkat kesejahteraan yang rendah.

Analisis Kesenjangan Distribusi Pendapatan

Penghitungan *Gini Ratio* di Kabupaten Cirebon cenderung meningkat dari tahun ke tahun selama periode 2011-2015. Pada tahun 2012 nilai *Gini Ratio* di Kabupaten Cirebon mengalami penurunan dibandingkan nilai *Gini Ratio* pada tahun 2011. Namun setelah tahun 2012 nilai *Gini Ratio* tidak pernah menunjukkan adanya penurunan kembali tetapi terus menunjukkan peningkatan, seperti yang disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil penghitungan *gini ratio* di Kabupaten Cirebon

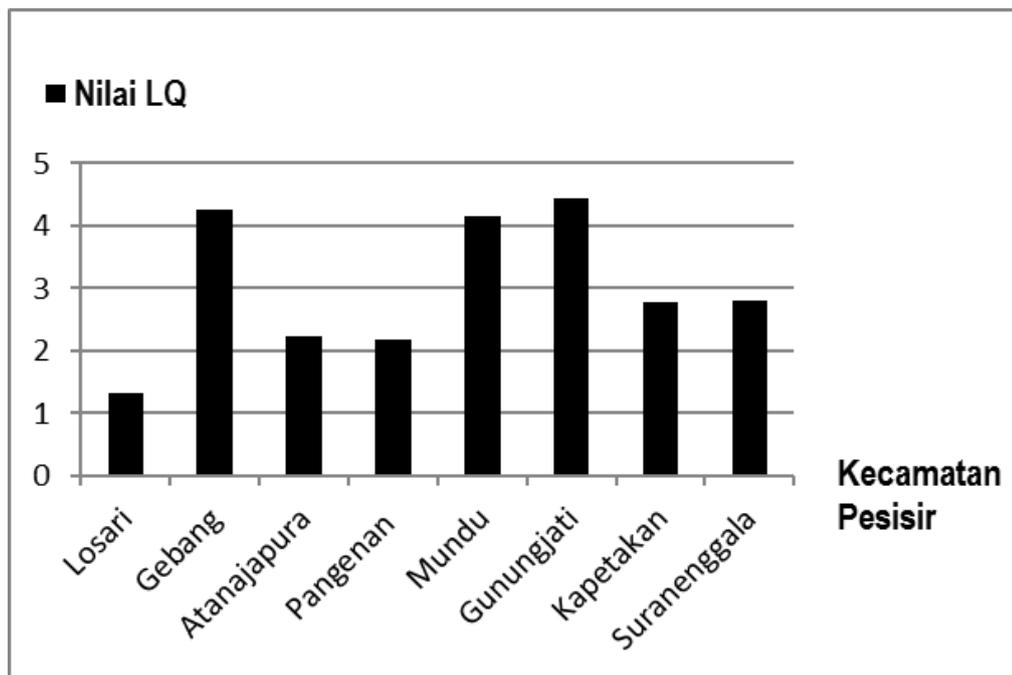
Tahun	<i>Gini Ratio</i>
2011	0,29
2012	0,27
2013	0,28
2014	0,29
2015	0,30

Tahun 2012 memiliki nilai *Gini Ratio* paling rendah di Kabupaten Cirebon yaitu sebesar 0,27 sedangkan nilai *Gini Ratio* paling tinggi di kabupaten Cirebon yaitu pada tahun 2015 sebesar 0,30. Penghitungan *Gini Ratio* di Kabupaten Cirebon selama kurun waktu 2011-2015 ini sendiri menggunakan data persentase Kelas Pendapatan Penduduk tiap tahunnya.

Koefisien Gini (*Gini Ratio*) adalah parameter yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan, Koefisien Gini bernilai antara 0 sampai dengan 1. Secara teori dapat dikatakan bahwa suatu distribusi pendapatan makin merata jika nilai Koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai Koefisien Gininya makin mendekati satu. (Ravallion dan Chen, 2001). Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 3, kecenderungan nilai Koefisien Gini Kabupaten Cirebon menjauhi angka 0, menunjukkan sinyal meningkatnya disparitas pendapatan.

Analisis Basis Ekonomi

Berdasarkan analisis LQ subsektor di wilayah pesisir, Kecamatan Gunungjati dan Kecamatan Gebang sebagai kecamatan dengan nilai LQ paling tinggi sedangkan Kecamatan Losari merupakan kecamatan dengan nilai LQ paling rendah yaitu hanya sebesar 1,33 pada tahun 2015. Gambar 1 berikut adalah diagram yang menampilkan nilai LQ subsektor perikanan pada 8 kecamatan pesisir.



Gambar 1. Nilai LQ sub sektor perikanan pada kecamatan-kecamatan pesisir di Kabupaten Cirebon pada Tahun 2015.

Pembangunan perikanan adalah salah satu pembangunan subsektoral yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah, penyerapan tenaga kerja serta pembangunan nasional secara menyeluruh (PKSPL 2002 dalam Rizal, 2013a). Cukup beralasan jika subsektor perikanan di Kabupaten Cirebon menjadi salah satu prioritas investasi

pembangunan daerah karena subsektor perikanan di wilayah kecamatan-kecamatan pesisir Kabupaten Cirebon memiliki nilai LQ lebih besar dari satu (>1). Dengan demikian, salah satu upaya dalam mengurangi disparitas di Kabupaten Cirebon, perlu dilakukan melalui investasi pembangunan di subsektor perikanan (sebagai sektor basis). Pemetaan subsektor perikanan bagian dari sektor basis di Kabupaten Cirebon sangat penting untuk mengatasi masalah disparitas pembangunan wilayah pesisir Kabupaten Cirebon.

Komoditas Unggulan Hasil Tangkapan

Penentuan komoditas unggulan dilakukan dengan melakukan penghitungan nilai produksi subsektor perikanan tangkap dengan menggunakan indeks LQ (Hood, 1998; Sodik dan Nuryadin, 2005; Rustiadi *et al.*, 2009; Miranti *et al.*, 2013). Nilai komoditas perdagangan subsektor perikanan tangkap, berdasarkan data statistik DKP Kabupaten Cirebon (2015) dibagi menurut kelompok komoditas ikan pelagis, kelompok binatang berkulit keras dan kelompok binatang berkulit lunak.

Tabel 4. Nilai LQ komoditas unggulan hasil tangkapan di Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2015.

No	Nama Spesies	LQ					Kelompok Komoditas
		2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Kakap Putih	0,02	0,08	0,02	1,3	1,43	Ikan Pelagis
2.	Selar	0,02	0,32	0,17	0,38	0,29	Ikan Pelagis
3.	Julung-julung	61,62	8,16	3,43	4,13	2,41	Ikan Pelagis
4.	Udang Dogol	0,38	0,44	3,71	5,14	1,45	Binatang Berkulit Keras
5.	Udang Krosok	0,18	1,53	3,34	4,33	4,47	Binatang Berkulit Keras
6.	Udang Windu	4,02	1,32	2,6	33,78	4,65	Binatang Berkulit Keras
7.	Kerang Darah	13,70	9,42	4,22	6,91	4,87	Binatang Berkulit Lunak
8.	Gurita	4,27	5,09	4,22	6,89	4,66	Binatang Berkulit Lunak
9.	Rajungan	0,64	2,44	3,17	6,02	3,68	Binatang Berkulit Keras

Berdasarkan hasil penghitungan LQ pada tabel 4 di atas, LQ tertinggi pada tahun 2011 adalah ikan julung-julung yaitu sebesar 61,62, kerang darah memiliki nilai tertinggi pada tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015 sebesar 9,42, 4,22, 4,88 dan 15,94. Pada tahun 2011 dan 2014 udang windu memiliki nilai LQ paling tinggi yaitu sebesar 33,78 dan 19. Sedangkan pada tahun 2014 Gurita memiliki nilai LQ tertinggi yaitu sebesar 22,83.

Subsektor perikanan di Kabupaten Cirebon termasuk sektor basis, baik berdasarkan aspek produksi ekonomi sektoral maupun berdasarkan produksi komoditas. Berdasarkan perhitungan Nilai LQ subsektor perikanan di kecamatan-kecamatan pesisir Kabupaten Cirebon sebesar di atas satu (>1) pada tahun 2015. Sementara, nilai LQ berdasarkan komoditas pada tahun 2011-2015, selain Ikan

selar, sebagian besar komoditas bernilai LQ lebih dari satu (>1). Hal ini menunjukkan bahwa komoditas perikanan tangkap memiliki kategori sebagai komoditas basis (unggulan). Hal ini juga bermakna besarnya peluang Kabupaten Cirebon untuk mengeksport komoditas tersebut ke daerah lain sehingga berpotensi untuk meningkatkan pendapatan daerah, sekaligus mengurangi disparitas yang terjadi di Kabupaten Cirebon

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada disparitas pendapatan Wilayah Pesisir dan Non Pesisir Kabupaten Cirebon ini adalah :

1. Hasil penghitungan Indeks Williamson dan Indeks *Gini Ratio* selama kurun waktu 2011-2015 menunjukkan adanya disparitas pendapatan baik pada wilayah pesisir maupun non pesisir. Disparitas tersebut mengalami peningkatan namun disparitas pendapatan wilayah non pesisir lebih besar daripada disparitas pendapatan wilayah pesisir. Hal ini terjadi baik pada disparitas secara regional maupun pada tingkat wilayah yang lebih rendah (kecamatan).
2. Subsektor perikanan di Kabupaten Cirebon merupakan basis ekonomi karena memiliki nilai LQ lebih dari 1 (>1), baik aspek sektoral maupun aspek komoditas. Komoditas unggulan yang memiliki nilai LQ yang tinggi dari tahun ke tahun adalah kerang darah, udang windu dan ikan julung-julung.

Saran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa subsektor perikanan merupakan sektor basis. Oleh karenanya untuk mengurangi disparitas di wilayah pesisir, pemerintah Kabupaten Cirebon perlu meningkatkan nilai investasi pada subsektor perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

- [DKP] Dinas Kelautan dan Perikanan. 2015. Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon. Pemerintah Kabupaten Cirebon Dinas Kelautan dan Perikanan.
- Friedmann J. 1987. *Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action*. Princeton University Press. Princeton.
- Hood R. 1998. *Economic Analysis: A Location Quotient*. Primer. Principal Sun Region Associates, Inc.
- Iyer S., Kitson M., Toh B. 2005. Social Capital, Economic Growth and Regional Development. *Regional Studies*. 39(8): 1015-1040.
- Miranti R, Yogi V, Erick H, Rebecca C, Alan D. 2013. Trends in Poverty and Inequality in Decentralising Indonesia, *OECD Social, Employment and Migration* (No. 148). OECD Publishing. <http://dx.doi.org/10.1787/5k43bvt2dwjk-en>.

- Ravallion M dan Chen S. 2001. *Measuring Pro-Poor Growth* (No. 2666). World Bank, Development Research Group, Poverty.
- Rérat P. 2012. The New Demographic Growth of Cities: The Case of Reurbanisation in Switzerland. *Urban Studies*. 49(5): 1107-1125.
- Rérat P dan Lees L. 2011. Spatial Capital, Gentrification and Mobility: Evidence from Swiss Core Cities. *Transactions of the Institute of British Geographers*. 36(1): 126-142.
- Rizal A. 2013a. Kinerja Sektor Perikanan Provinsi Banten. *Jurnal Akuatika*. 4(1): 21-34.
- Rizal A. 2013b. Disparitas Pembangunan Wilayah Pesisir (Studi Kasus Kabupaten Tasikmalaya). *Jurnal Akuatika*. 4(2): 115-130.
- Rustiadi E, Saefulhakim S, dan Panuju DR. 2009. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Samuelson PA dan Nordhous WD. 1992. *Makro Ekonomi*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Sodik J. dan Nuryadin D. 2005. Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Regional (Studi Kasus Pada 26 Provinsi di Indonesia, Pra dan Pasca Otonomi). *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 10 (2): 157-170.
- Todaro M. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Williamson JG. 1965. *Regional Inequality and The Process National Development: Descriptions of The Patterns*. Chicago University. USA.